

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, Siti Ummu, *“Implikasi Hukum dari Perkawinan Sirri Terhadap Perempuan dan Anak”* Palaster, Vol.7 No.1, (Juni 2014).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam <http://disdukcapilmusirawas.org/apa-itu-istbat-nikah/> diakses tanggal 20 januari 2023 pukul 00.59.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam <http://disdukcapilmusirawas.org/apa-itu-istbat-nikah/> diakses tanggal 04 juni 2023 pukul 19. 00.
- Gramedia Blog/Wawancara, diakses pada tanggal 04 juni 2023 pukul 17.00.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Cetakan I. Bandung.
- H. MANSUR BASIR, (Staf pada Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenag Prov. Gorontalo), *“SOLUSI HUKUM BAGI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (SIRRI)”* diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 01.05.
- Hasil Wawancara dengan Bapak H. Nur Kholis, S. Ag, M. Si. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, tanggal 28 Januari pukul 10.30 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bapak H. Nur Kholis, S. Ag, M. Si. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, tanggal 28 Januari pukul 10.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Khabni masyarakat yang mengikuti Program Isbath Nikah Terpadu Kabupaten Jombang Tahun 2022, tanggal 02 februari 2023 pukul 16.15.
- Hasil Wawancara dengan Bapak M. Miftahul Huda masyarakat yang mengikuti Program Isbath Nikah Terpadu Kabupaten Jombang Tahun 2022, tanggal 31 Januari 2023 pukul 11.30.
- Herawati, N. I., Rakhmat, H. C., & Lestari, T. (2022). *Dinamika Perkembangan Anak Usia Dini*. EDU PUBLISHER.
- Indonesia, pasal 43 Undang-undang No.1 tahun1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.
- Indonesia, Putusan dari Mahkamah Konstitusi No. 46 / PUU (pengujian Undang-undang tahun 2010).
- Indonesia, Putusan dari Mahkamah Konstitusi No. 46 / PUU (pengujian Undang-undang tahun 2010).
- Indonesia, Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia, Undang-undang No.2 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.
- Indonesia, Undang-undang No.23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan.
- Indonesia, Undang-Undang, UU No 1 Tahun 1974, LN No 1 Tahun 1974.

Iqbal, Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hal. 87.

KBBI.web.id/Hak, diakses tanggal 20 Januari 2023 pukul 00.55.

KBBI.web.id/isbath nikah, diakses tanggal 20 Januari 2023 pukul 00.55.

KBBI.web.id/perlindungan, diakses tanggal 21 september 2022 pukul 00.55

Keputusan presiden Nomor 77 tahun 2003.

Mariyatul Qitbiyah, ishbat nikah massal dan implementasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya prespektif maqashid shari'ah.

Mariyatul Qitbiyah, ishbat nikah massal dan implementasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya prespektif maqashid shari'ah.

Meilinda, Alifa Yessi, Dewi Gemala, Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT).

Mulia, Siti Musdah, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005).

Pemenuhan Hak Anak Fondasi masa Depan Bangsa Kementerian KBP diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 00.22

Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Kelas 1A dalam <https://www.pajombang.go.id/Pengadilan-Agama-Jombang-Sukses-Gelar-Sidang-Isbat-Nikah>. Diakses pada tanggal 23 januari 2023 pukul 21.50.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Portal resmi pemerintah kabupaten jombang dalam <https://jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil/berita/sidang-isbat-nikah-terpadu-sebagai-upaya-perlindungan-hak-anak-atas-perkawinan-belum-tercatat>. Diakses pada tanggal 23 januari 2023 pukul 22.15.

Pratiwi, Zuni Ayu, "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA. Bkl", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2018)

Program sidang Isbath Nikah Terpadu, Masyarakat Kecamatan Baso diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 00.35

Qitbiyah, Mariyatul, ishbat nikah massal dan implementasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya prespektif maqashid shari'ah.

R Wiyono, S. H. (2022). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Utama, Jakarta,1997.

Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islamdi Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media,2001).

Sidang Isbath Nikah Terpadu, sebagai upaya perlindungan Hak Anak katas perkawinan belum tercatat diakses pada tanggal 24 juli 2022 pada pukul 00.37

Siti Ummu Adilla, Implikasi Hukum dari Perkawinan Sirri Terhadap Perempuan dan Anak (Palaster, Vol.7 No.1, Juni 2014), hlm.210.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R&D, (Bandung; 2015).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R&D.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Fajar Interpretama offset ,2006.

Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Undang-undang NO 22 Tahun 1946.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

Wikipedia.web.id/kecamatan ngoro, diakses tanggal 09 maret 2023 pukul 22.50.